

BAB III

POLITIK EKONOMI INDONESIA

A. Hubungan Politik dan Ekonomi

Ilmu politik dan ekonomi adalah dua disiplin ilmu berbeda yang berada di bawah payung ilmu sosial. Keterkaitan antara ilmu politik dan kekuasaan terlihat jelas, karena ilmu politik mencakup studi tentang sistem dan institusi pemerintahan, yang penting untuk membangun dan mempertahankan otoritas dalam suatu negara atau masyarakat. Kewenangan ini sangat penting dalam mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat.¹

Sebelum bentuknya yang sekarang, bidang ekonomi sebagian besar didasarkan pada disiplin ekonomi politik. Ekonomi politik merupakan salah satu unsur penyusun bidang filsafat. Tidak diragukan lagi, evolusi ekonomi politik sangat terkait dengan kontribusi intelektual John Stuart Mill, khususnya melalui publikasi penting, terutama, “Principles of Political Economy.” Karya sastra ini mengeksplorasi berbagai topik penting yang menjadi pilar fundamental bagi kemajuan pertumbuhan ekonomi. Diantaranya teori nilai dan distribusi, mekanisme pertukaran, dinamika produksi, dinamika tenaga kerja, fungsi entitas pemerintah, kebijakan perpajakan, utang negara, dan ideologi sosialisme.² Salah satu perbedaan penting antara pendekatan ekonomi politik dan ekonomi murni terletak pada perspektif masing-masing mengenai dinamika kekuasaan yang melekat dalam

¹ Saiful Anwar, ‘Ekonomi Politik Syariah’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 968–75 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3100>>.

² <https://umsu.ac.id/berita/ekonomi-politik-dan-sejarah-perkembangannya/> 23 april 2023/ 14.40 WIB

masyarakat manusia. Menurut prinsip ekonomi politik, distribusi kekuasaan dalam suatu masyarakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil perekonomiannya. Sebaliknya, perspektif ekonomi murni memandang struktur kekuasaan yang ada sebagai aspek yang menguntungkan dan menguntungkan dalam kehidupan individu. Para ahli ekonomi politik mengembangkan gagasan tentang perlunya merangsang aktivitas ekonomi (bisnis). Pasar pada saat itu dianggap belum berkembang, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk membuka bisnis baru, melindungi dari persaingan, dan memantau kualitas produk. Namun, pada akhir abad ke-18, pandangan ini mendapat tantangan, persepsi terhadap pemerintah sebagai lembaga yang efektif dalam mengatur kegiatan ekonomi semakin berkurang, dan semakin berkembangnya pandangan bahwa pemerintah menghambat pencapaian keberhasilan. Wacana di kalangan ekonom politik pada akhirnya memunculkan berbagai cabang dalam tradisi ekonomi politik.

Evolusi sistem perekonomian Indonesia sangat erat kaitannya dengan kontribusi para intelektual ekonomi Indonesia. Indonesia memiliki banyak tokoh ekonomi terkemuka yang telah memberikan pengaruh signifikan terhadap evolusi kerangka perekonomian negara. Banyak tokoh ekonomi di Indonesia yang memberikan pemikirannya mengenai sistem ekonomi Indonesia. Setiap periode kepemimpinan di Indonesia memiliki sistem ekonominya masing-masing hingga akhirnya muncul kebijakan-kebijakan yang diterapkan.

Sistem perekonomian Indonesia dapat digolongkan menjadi dua zaman utama: zaman pra kemerdekaan dan zaman kemerdekaan. Periode sejarah ini telah

memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan ekonomi politik Indonesia saat ini.³

1. Periode Sebelum Kemerdekaan.

Periode sebelum kemerdekaan dapat dikategorikan menjadi dua periode berbeda: era prakolonial dan era kolonialisme. Masa prakolonial mengacu pada jangka waktu mulai dari berdirinya kerajaan-kerajaan di nusantara, yang terjadi kira-kira pada abad ke-5, dari abad ke-15 hingga abad ke-17, nusantara mengalami kebangkitan penjajah yang melakukan kontrol sistematis atas wilayah ekonomi dan politik. Pada masa itu belum terjadi pembentukan bangsa Indonesia. Kerajaan sering kali menjalankan kekuasaan atas berbagai wilayah. Menurut Van Leur, perdagangan di era kerajaan tradisional dapat dicirikan sebagai kapitalisme politik, dimana keterlibatan raja yang signifikan memberikan pengaruh yang besar terhadap aktivitas komersial. Pada masa Sriwijaya, terjadi peningkatan signifikan dalam perdagangan internasional antara Asia Timur, Asia Barat, dan Eropa, yang menandai periode kemakmuran dan pertumbuhan. Perolehan kekayaan oleh raja dan bangsawan difasilitasi melalui pengumpulan beberapa upeti dan pajak. Jenis produk tertentu tidak memiliki perlindungan karena ketergantungannya pada sejumlah besar kapal yang melintasi wilayah tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

³ Rowland B F Pasaribu, 'Masalah Perekonomian Indonesia', 180–234.

Tidak diragukan lagi, raja-raja di Sumatra pada dasarnya memperoleh kekuasaan dan mengumpulkan uang melalui perdagangan, namun di Jawa, perolehan kekuasaan dan akumulasi kekayaan sebagian besar berasal dari pertanian dan perdagangan. Selama era pra-kolonial, pelayaran komersial merupakan kekuatan utama dalam perdagangan maritim. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa pertanian dan perdagangan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan perekonomian Indonesia di berbagai wilayah. Untuk lebih jelasnya, sistem pemerintahan yang berlaku dapat bersifat feodal, dimana kerangka sosial didominasi oleh kaum bangsawan. Selama periode ini, kegiatan ekonomi utama berputar:

- a. Salah satu contoh praktek pertanian di Indonesia adalah penanaman padi di Jawa dan produksi rempah-rempah di Maluku.
- b. Penyelidikan dan pemanfaatan sumber daya alam, seperti hasil laut dan bahan tambang, untuk berbagai keperluan.
- c. Perdagangan internasional dan antar pulau mempunyai arti penting karena sebagian besar bergantung pada jalur transportasi laut.

Selanjutnya periode kolonialisme yaitu sebelum kemerdekaan Indonesia.

Belanda, yang masa pemerintahannya berlangsung selama 350 tahun, menerapkan beberapa sistem yang terus bertahan hingga saat ini. Belanda, yang menganut ideologi merkantilisme pada saat itu, memberikan kewenangan kepada VOC untuk mengelola Hindia Belanda sebagai upaya

untuk menghindari persaingan antara pedagang Belanda, serta persaingan dengan perusahaan-perusahaan kekaisaran negara lain seperti EIC (Inggris).

VOC memperoleh hak-hak atas Octrooi, yang meliputi, antara lain:

- a. Hak mengeluarkan mata uang
- b. Hak untuk merekrut dan memecat personel
- c. Hak prerogatif untuk menentukan perang ekonomi dan perdamaian
- d. Hak istimewa untuk menegosiasikan perjanjian dengan raja

Pemerintahan Hindia Belanda termotivasi untuk mengubah kebijakan ekonominya karena pengaruh yang diberikan oleh para humanis Belanda yang berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi. Langkah-langkah legislatif diberlakukan untuk mengatur beberapa aspek pertanian, termasuk penyewaan lahan. Kepemilikan tanah pada pemerintahan Hindia Belanda ditandai dengan adanya pihak swasta yang mengoperasikan perkebunan swasta yang mewakili kelas kapitalis, sedangkan penduduk asli sebagian besar berperan sebagai pekerja yang tidak memiliki tanah. Penerapan asas keuntungan absolut mengisyaratkan bahwa ketika harga barang di suatu tempat melebihi biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk produksi, selanjutnya, para pengusaha akan memperoleh keuntungan yang besar, sehingga mendorong masuknya faktor-faktor produksi ke wilayah tersebut. Pada dasarnya, sistem ini tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, sekaligus memperparah kesengsaraan mereka, terutama bagi pekerja kontrak yang sering menghadapi kondisi di bawah standar.

2. Periode Kemerdekaan

Pada periode kemerdekaan dibawah pimpinan Ir. Soekarno, masyarakat Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi yang berlandaskan pancasila dan kerangka konstitusi yang dituangkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, segala upaya kemasyarakatan dan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Penggabungan Pancasila dan UUD 1945 penting bagi tegaknya sistem perekonomian Indonesia. Dalam konteks sistem demokrasi ekonomi, seluruh anggota masyarakat, baik kelompok masyarakat kurang mampu maupun pengusaha, secara kolektif dan aktif berupaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Selain itu, negara juga berperan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengarahan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, terjalin hubungan kolaboratif dan timbal balik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Cara ini tetap berlaku hingga era Reformasi. Setelah jangka waktu ini, pemerintah menerapkan kerangka ekonomi yang didasarkan pada ekonomi kolektif. Dalam hal ini, pemerintah tegas dalam upayanya membangun kerangka sosial-ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 yang berisi tentang asas-asas dasar yang menjadi pedoman kebijakan negara. Khususnya, keputusan ini secara tegas mendeklarasikan sistem perekonomian Indonesia yang berpusat pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka sosial ekonomi,

masyarakat berperan aktif dalam upaya perekonomian, sedangkan pemerintah menumbuhkan iklim yang kondusif bagi perluasan dan kemajuan dunia usaha.

Pada masa kemerdekaan, Indonesia banyak dipengaruhi oleh ideologi ekonomi yang merasuki perekonomiannya. Ideologi ini mencakup berbagai sistem ekonomi, yaitu kapitalisme, sosialisme, ekonomi campuran, dan ekonomi Islam.⁴

- a. Ideologi Sistem Ekonomi Kapitalis, atau yang biasa disebut Liberalisme Kapitalis. Pertengahan abad 18 muncul paham liberalisme yakni aktifitas ekonomi yang dititik beratkan kepada kepentingan diri sendiri, “merdeka berbuat merdeka bertindak” menginginkan kebebasan serta menolak adanya pembatasan.⁵ Dalam ideologi ini melihat bahwa dengan adanya campur tangan Negara atau pemerintah hanya akan menyebabkan konflik dan kemunduran saja. Akan tetapi dengan adanya liberalisme ini Negara masih mempunyai peran yaitu sebagai pencegah kegagalan pasar dan sebagai ajang kerja sama yang memberikan keuntungan satu sama lain. dan memiliki kebebasan yang seluas luasnya. Akan tetapi dalam perkembangannya justru menimbulkan bahaya yakni muncul

⁴ Muslihati, Resky Amaliyah S, dan Resky Amalia Hamiruddin, 'Ideologi Dan Isme Dalam Sistem Ekonomi', *AT TAWAZUN: Ekonomi Islam*, 1.1 (2021), 17–25 <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/article/view/19932>>.

⁵ Muhammad Rapii, Huzain Jailani, dan Danang Prio Utomo, *Perekonomian Indonesia* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2022).

kaum borjuis menganut sistem kapitalis yang merenggut kemerdekaan hak milik. Adapun dampak dari Kapitalisme ini ialah penimbunan barang barang, peganguran dimana mana, krisis dunia terjadi berulang ulang, serta terjadi kemelaratan di segala lapisan Masyarakat.⁶

- b. Ideologi sistem ekonomi sosialisme atau yang biasa disebut Sosialisme Komunisme belum lama keberadaanya sekitar kurang lebih baru satu setengah abad. Janet mengemukakan pendapatnya sosialisme adalah sebuah ajaran bahwa Negara yang mempunyai wewenang atas hak memberikan ketidakrataan kekayaan dan berhak melakukan kesetaraan menurut hukum, dengan cara mengambil hak kepada orang yang kelebihan dan di berikan kepada orang yang kekurangan. Beberapa perkembangan zamanya marxisme hadir dan menjadi pegangan kaum sosialis, Karl Marx yang menjadi tokoh yang mampu menghapus hak milik perseorangan serta menghapus segala hak waris. Dan memusatkan seluruh kekuasaan kebutuhan ekonomi dan alat produksi di pusatkan ke Negara. Untuk mencapai apa yang di inginkanya sosialisme melakukan berbagai kekerasan agar sesuai dengan strategi radikal dan revolusioner yang tidak mengenal batasan batasan kesusilaan

⁶ Rabiatul Adawiah, 'Perspektif Beberapa Ideologi Tentang Ekonomi (Sebuah Kajian Filsafat Ekonomi)', *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 3.2 (2013).

bertumpu pada pribahasa “Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai pendekatan dapat digunakan, mencakup prosedur yang diperbolehkan (halal) dan tidak diperbolehkan (haram).⁷

Sistem ekonomi khusus ini dapat dianggap sebagai modus perlawanan terhadap sistem ekonomi sebelumnya, khususnya sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis mendapat kritik karena dianggap tidak mampu menghasilkan distribusi manfaat sosial yang adil. Selain itu, pengusaha pribumi seringkali menghadapi tantangan dalam bersaing dengan pengusaha non-pribumi, khususnya yang berasal dari Tiongkok. Pada akhirnya, kerangka kerja khusus ini semakin memperparah tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia. Sistem ekonomi sosialis berbeda dari sistem ekonomi kapitalis dengan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan siklus ekonomi kepada dinamika pasar yang berlaku. Dalam kerangka ekonomi sosialis, negara mempunyai peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan ekonomi di seluruh rangkaian sosial ekonomi, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Sistem ekonomi sosialis bukan berarti individu tidak bebas beroperasi secara ekonomi, individu tetap memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun sangat terbatas dan tunduk pada campur tangan pemerintah secara luas. Pemerintah ikut campur tangan untuk bersama-sama

⁷ Adawiah.

mencapai kemakmuran masyarakat, namun di sisi lain, pembatasan hak milik individu telah diamati mempunyai dampak yang merugikan terhadap inovasi individu, karena penindasan terhadap semangat kewirausahaan oleh otoritas pemerintah cenderung mengaburkan upaya untuk mencapai kekayaan bersama. Sistem ekonomi sosialis berpendapat bahwa kesejahteraan individu bergantung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hasilnya berarti bahwa kendali dan kepemilikan aset ekonomi dan elemen produksi yang ada sebagian besar merupakan aset sosial.

- c. Ideologi sistem ekonomi campuran atau yang disebut Ekonomi Pancasila. Tujuan utama pembentukan sistem ekonomi Pancasila adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu, ekonomi Pancasila juga sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan. Ekonomi Pancasila juga menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, termasuk kekeluargaan dan gotong royong. Konsep tersebut dijabarkan dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang secara tegas menegaskan bahwa perekonomian diselenggarakan sebagai suatu usaha kerja sama yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan. Salah satu usaha yang dilakukan dengan asas kekeluargaan dengan asas ini adalah koperasi dengan sistem ekonomi pancasila yang tidak menghendaki kemakmuran satu

orang melainkan kemakmuran seluruh masyarakat. Dan dengan adanya organisasi koperasi ini diharapkan dapat menciptakan kemakmuran dan kekeluargaan.

Dari segi finansial, sistem ekonomi Pancasila memang tidak terlalu menguntungkan, namun sistem ekonomi ini lebih manusiawi dan beretika, karena ekonomi Pancasila lebih mengedepankan faktor sosial, keadilan dan persaudaraan. Selain ekonomi kodrati dan ekonomi moral, ekonomi Pancasila juga memiliki pedoman normatif yang keduanya merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia.⁸

Kebijakan-kebijakan sistem ekonomi ini dapat diimplementasikan dengan perubahan-perubahan, antara lain: Kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan politik, pembangunan ekonomi, dan pembangunan sosial budaya.

Dengan adanya ideologi-ideologi tersebut yang ada di negara Indonesia sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia cenderung menganut ideologi campuran/Pancasila karena ideologi tersebut adalah hasil dari bertemunya dua ideologi yang kemudian diolah dengan perspektif sosial dan budaya di Indonesia. Hingga akhirnya dalam hal penetapan dan

⁸ S E Farid Ardyansyah dan CIQnR MM, 'SISTEM EKONOMI DI INDONESIA', *Perekonomian Indonesia*, 2022, 1.

pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng dilakukan berdasarkan ideologi Pancasila yang diselaraskan juga dengan ideologi Islam.

B. Konsep Dasar dalam Politik Ekonomi

Konsep-konsep dasar ekonomi politik mencakup⁹:

1. Konsep kekuasaan dalam bidang ekonomi politik berkaitan dengan pemeriksaan terhadap individu atau entitas yang memiliki pengaruh dalam suatu sistem ekonomi, serta cara kekuasaan tersebut digunakan untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya ekonomi.
2. Bidang ekonomi politik mengkaji berbagai sistem ekonomi, termasuk kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran, serta menganalisis dampaknya terhadap alokasi sumber daya ekonomi.
3. Kebijakan publik adalah subjek dalam bidang ekonomi politik yang mengkaji dampak dari berbagai tindakan pemerintah, termasuk perpajakan, subsidi, peraturan, dan kebijakan moneter, baik terhadap perekonomian maupun masyarakat.
4. Bidang ekonomi politik mengkaji fungsi pasar, yang mencakup aspek-aspek seperti persaingan, mekanisme penetapan harga,

⁹ Irjus Indrawan, 'Konsep Dasar Ekonomi Pendidikan Pada Tataran Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik Di Indonesia', *INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies*, 19.1 (2019), 91–98.

dinamika penawaran dan permintaan, serta dampak pasar terhadap pengambilan kebijakan dan alokasi sumber daya ekonomi.

5. Konsep kelas sosial merupakan fokus utama dalam bidang ekonomi politik, karena konsep ini mengeksplorasi pengaruh berbagai kelompok sosial terhadap perekonomian dan dampak alokasi sumber daya ekonomi terhadap isu-isu ketimpangan dan ketidakadilan sosial.
6. Bidang ilmu politik mengkaji berbagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi, termasuk investasi, teknologi, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, studi ini mengeksplorasi hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan perumusan kebijakan ekonomi serta alokasi sumber daya.
7. Bidang ekonomi politik menyelidiki pengaruh perekonomian terhadap lingkungan dan mengeksplorasi cara-cara di mana kebijakan dapat memfasilitasi pembangunan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi politik memfasilitasi pemahaman tentang fungsi sistem ekonomi dan potensi pengaruh kebijakan publik terhadap perekonomian dan masyarakat.

Setiap negara demokrasi selalu memiliki persaingan pemilu menentukan pembuat kebijakan ekonomi, motivasi partisipan tersebut sangat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi sehingga ini menjadi salah satu tujuan berpartisipasi dalam persaingan pemilu.

Indonesia sebagai negara yang menjadikan UUD 1945 sebagai dasar undang-undangnya menjadi sebuah negri hukum yang dipimpin oleh presiden, Pembukaan UUD 1945 menjelaskan tujuan penyelenggaraan negara Indonesia yang meliputi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia dan pembangunan kesejahteraan ekonomi seluas-luasnya. Diantara produk hukum yang dihasilkan sebagai perealisasiian perlindungan seluruh masyarakat bangsa Indonesia, dalam hal ini perekonomian, yaitu yang tercantum dalam pasal 23, 27, 28, 31, 33 dan 34. Satu pasal yakni pasal 33 menerangkan tentang aturan tata Kelola ekonomi mayarakat, sedangkan lima yang lainnya menerangkan soal kewajiba negara dalam bersosialisasi terhadap masyarakatnya.¹⁰

Dengan adanya kelangkaan minyak goreng akibat dugaan kartel harga minyak goreng di Indonesia yang menyebabkan harga berlipat ganda, Pemerintah perlu memiliki kebijakan untuk mengendalikan produksi dan harga produk ini.

¹⁰ Nugraha, Zubaedah, dan Apriani; Siahaan, Herawati, dan Adrian.